

GOOD TOURISM GOVERNANCE DALAM PENGELOLAAN EKOWISATA MANGROVE KAMPUNG TELUK SEMANTING KABUPATEN BERAU

Wini Ananda Utamy¹; Elisa Susanti²; Nunung Runiawati³

^{1,2,3}Department of Public Administration, Faculty of Social and Political Sciences, Universitas Padjadjaran,
Bandung, Indonesia

¹wini18002@mail.unpad.ac.id; ²n.runiawati@unpad.ac.id; ³elisa.susanti@unpad.ac.id

ABSTRACT

At present, all development in Indonesia applies the concept of sustainability, including in the tourism sector. In order to achieve this mission, the process needs to be carried out with good tourism governance. Mangrove Ecotourism itself has received various supports from three key actors, namely the government, the private sector, and the community. However, in reality the management of ecotourism has not met expectations, so it is interesting to study. The research method used is descriptive qualitative by collecting data through observation, literature study, and interviews with 9 informants involved in the management of the Teluk Semanting's Mangrove Ecotourism. It aims to understand, analyze, and explain various aspects of existing management. The theory put forward (Sunaryo 2013) is in the form of synergistic active participation between three key actors in achieving success indicators that refer to the principles of sustainable and environmentally sound tourism development, namely active participation of related communities, involvement of all stakeholders, local ownership partnerships, sustainable use of resources, accommodating community aspirations, environmental carrying capacity, program monitoring and evaluation, environmental accountability, training for related communities, as well as promotion and advocacy of local cultural values are used as references in this research. The results showed that the management of the Teluk Semanting's Mangrove Ecotourism had been carried out well even though 5 out of 10 indicators were not yet optimal, in more detail in the form of a lack of human resources from the community, not yet effective communication between actors, especially the government and the private sector, some tourism resources have not been classified safe for tourists, there are no waste processing utilities and inadequate telecommunication networks, there are no records related to training, and the lack of culture and promotional information.

Keywords: Good Tourism Governance, Ecotourism, Mangrove Teluk Semanting

ABSTRAK

Pada saat ini segala pembangunan yang ada di Indonesia menerapkan konsep berkelanjutan termasuk dalam sektor pariwisata. Guna mencapai misi tersebut maka dalam prosesnya perlulah dilakukan dengan tata kelola kepariwisataan yang baik. Ekowisata Mangrove ini sendiri telah mendapat berbagai dukungan dari tiga aktor kunci yaitu pemerintah, swasta, dan masyarakat. Namun dalam kenyataannya pengelolaan ekowisata ini belum sesuai harapan sehingga menarik untuk diteliti. Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif deskriptif dengan mengumpulkan data melalui observasi, studi literatur, dan wawancara dengan 9 orang informan yang terlibat dalam pengelolaan Ekowisata Mangrove Teluk Semanting. Hal ini bertujuan untuk memahami, menganalisis, dan menjelaskan berbagai aspek pengelolaan yang ada. Teori yang dikemukakan (Sunaryo 2013) berupa partisipasi aktif yang sinergis antar tiga aktor kunci dalam mencapai indikator keberhasilannya yang mengacu pada prinsip pembangunan pariwisata berkelanjutan dan berawasan lingkungan yaitu partisipasi aktif masyarakat terkait, keterlibatan segenap pemangku kepentingan, kemitraan kepemilikan lokal, pemanfaatan sumber daya secara berkelanjutan, mengakomodasi aspirasi masyarakat, daya dukung lingkungan, monitoring dan evaluasi program, akuntabilitas lingkungan, pelatihan pada masyarakat terkait, serta promosi dan advokasi nilai budaya lokal dijadikan sebagai acuan dalam penelitian ini. Hasil penelitian menunjukkan pengelolaan Ekowisata Mangrove Teluk Semanting telah terlaksana dengan baik meskipun 5 dari 10 indikator yang ada belum optimal, secara lebih rincinya berupa kurangnya sumber daya manusia dari masyarakat, belum efektifnya komunikasi antar para aktor khususnya pemerintah dan swasta, beberapa sumber daya pariwisata belum tergolong aman bagi wisatawan, tidak adanya utilitas pengolahan limbah dan jaringan telekomunikasi yang belum memadai, tidak adanya pencatatan terkait pelatihan, dan minimnya budaya serta informasi promosi.

Kata kunci: Tata Kelola Kepariwisata Yang Baik, Ekowisata, Mangrove Teluk Semanting

PENDAHULUAN

Dalam pengembangannya, pariwisata di Indonesia masih mengalami beberapa masalah diantaranya terkait tidak dimanfaatkannya sumber daya secara berkelanjutan dan lemahnya pengelolaan pariwisata karena belum optimalnya ketersediaan konektivitas dan infrastruktur, kesiapan masyarakat sekitar destinasi pariwisata, dan kemudahan investasi. Saat ini Indonesia sendiri telah menerapkan konsep pembangunan berkelanjutan dengan tujuan mampu memenuhi kebutuhan saat ini dan masa mendatang. Konsep tersebut sejalan dengan salah satu asas penyelenggaraan kepariwisataan dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2009, yaitu asas berkelanjutan. Dari sanalah lahir konsep pariwisata berkelanjutan di Indonesia yang kriteria dasar pembangunannya adalah didukung secara ekologis dalam jangka panjang, layak secara ekonomi, adil secara etika, dan sosial terhadap masyarakat dengan tujuan mempertahankan keuntungan pengembangan pariwisata sekaligus mengurangi dampak yang tidak diinginkan pada lingkungan, sosial, ekonomi, dan budaya.

Pariwisata berkelanjutan dapat tercapai dengan menyeimbangkan kebutuhan wisatawan dengan tujuan, salah satu bentuk implementasinya adalah konsep ekowisata yang merupakan kegiatan wisata alam di daerah yang bertanggung jawab dengan memperhatikan unsur pendidikan, pemahaman, dan dukungan terhadap usaha-usaha konservasi sumberdaya alam serta peningkatan pendapatan masyarakat lokal.

(Sunaryo 2013) mengatakan terkait dengan tujuan dan misi pembangunan pariwisata berkelanjutan dan berwawasan lingkungan hanya dapat tercapai jika dalam proses pencapaiannya dilakukan dengan tata kelola kepariwisataan yang baik (*Good Tourism Governance*). *Good Tourism Governance* merupakan konsep yang mengadaptasi konsep *Good Governance* untuk melakukan pengelolaan di sektor pariwisata. Prinsip dari tata kelola kepariwisataan yang baik ini dapat dilihat dari adanya partisipasi aktif yang sinergis (koordinasi dan komunikasi yang efektif serta sinkronisasi program) antar tiga aktor kunci yaitu pemerintah, swasta, dan masyarakat dalam menjalankan indikator keberhasilannya yaitu partisipasi masyarakat terkait, keterlibatan segenap pemangku kepentingan, kemitraan

kepemilikan lokal, pemanfaatan sumber daya secara berlanjut, mengakomodasi aspirasi masyarakat, daya dukung lingkungan, monitoring dan evaluasi program, akuntabilitas lingkungan, pelatihan pada masyarakat terkait, serta promosi dan advokasi nilai budaya kelokalan.

Kabupaten Berau sendiri dikenal sebagai daerah yang menjadi salah satu gerbang pembangunan di provinsi Kalimantan Timur bagian utara dengan potensi pariwisatanya yang cukup menjanjikan dengan daya tarik bagi wisatawan domestic maupun mancanegara. Tercatat pada Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Berau ada 173 destinasi wisata alam, laut, dan kebudayaan yang ada di Berau. Salah satu destinasi wisata alam yang juga telah menerapkan konsep ekowisata adalah kawasan mangrove di Kampung Teluk

Semanting. Dimana hadirnya destinasi tersebut berawal dari kesadaran masyarakat Kampung Teluk Semanting akan pentingnya menjaga lingkungan hutan mangrove setelah mereka nyaris kehilangan mata pencaharian yang rata-rata sebagai nelayan dan akibat pemanfaatan secara berlebihan pada ekosistem mangrove juga mengakibatkan kawanan satwa liar memasuki pemukiman penduduk guna mencari makanan.

Berdasarkan hasil studi kepustakaan dan observasi awal, ditemukan indikasi masalah pada Ekowisata Mangrove Teluk Semanting sebagai berikut.

1. Dalam dokumen Site Plan Ekowisata Mangrove Kampung Teluk Semanting Tahun 2017, ditemukan 3 jenis burung berada pada status mendekati terancam punah dan 1 jenis termasuk dalam status terancam. Pun akibat perburuan liar, hewan lain seperti kawanan bekantan, elang bondol, dan lain sebagainya sudah jarang terlihat keberadaannya. Meskipun saat ini masyarakat mulai berupaya menjaga ekosistemnya, hal tersebut belum mampu mengembalikan kondisi ekosistem didalamnya dengan baik. Dan pada dasarnya penerapan kebijakan perburuan liar disekitar kampung belum optimal.
2. Berdasarkan presentasi Tim Pengelola Mangrove Kampung Teluk Semanting yang termuat dalam laman berita Antara Kaltim 2020, didapati adanya perambahan dan perusakan hutan mangrove yang ada dikarenakan pengupasan kulit mangrove oleh masyarakat sekitar Kampung Teluk Semanting mengakibatkan pohon-pohonnya menjadi mati.
3. Berdasarkan kondisi di lapangan, aksesibilitas menuju Kampung Teluk

Semanting kurang memadai. Dalam laman berita (Headline Kaltim 2022), permasalahan ini disebabkan kurang aktifnya pemerinatah dalam memperhatikan dan mengawasi kondisi di lapangan secara langsung. Meskipun saat ini kondisi jalan telah lebih baik, namun belum ada petunjuk jalan yang jelas untuk menuju Ekowisata Mangrove Teluk Semanting dari jalan kabupaten yang ada.

4. Dalam laman berita Liputan 6 (Jalil 2020), pembukaan jalan dengan mengorbankan hutan mangrove masih terjadi di Kampung Teluk Semanting. Salah satunya yang Pemerintah Kabupaten Berau lakukan pada tahun 2020, dimana akhirnya mendapat penghentian dari masyarakat akibat menyalahi prinsip pemanfaatan sumber daya yang ada dan melewati ambang batas pembangunan. Program pembangunan tersebut juga tidak disertai adanya komunikasi pada pihak lokal. Terbangkalainya area pembukaan jalan tersebut juga lah yang memicu semakin mudahnya perburuan liar dan pengrusakan ekosistem mangrove.
5. Meskipun saat ini promosi telah gencar dilakukan, tetapi bentuk pemasarannya belum optimal. Sehingga masih banyak masyarakat yang belum mengetahui adanya Ekowisata Mangrove di Kampung Teluk Semanting.

Berdasarkan latar belakang penelitian dan indikasi masalah diatas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul "**Good Tourism Governance Dalam Pengelolaan Ekowisata Mangrove Kampung Teluk Semanting Kabupaten Berau**" dengan pertanyaan penelitian "Bagaimana pengelolaan Ekowisata Mangrove Teluk Semanting berdasarkan perspektif *Good Tourism Governance*?"

METODE

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif deskriptif dengan tujuan untuk menjelaskan apa yang terjadi. Desain penelitian yang digunakan adalah desain penelitian studi kasus, yang mana desain penelitian dilakukan dengan meneliti secara cermat suatu program, peristiwa, aktivitas, proses atau sekelompok individu yang terlibat dalam proses pengelolaan Ekowisata Mangrove Kampung Teluk Semanting. Peneliti menggunakan data primer dan sekunder sebagai sumber pengumpulan data. Data primer sendiri adalah data yang penulis peroleh langsung dari Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten

Berau, Pemerintah Kampung Teluk Semanting, dan Tim Pengelola Mangrove. Dan data sekunder yaitu studi kepustakaan berupa literatur, laporan ilmiah, dan lain sebagainya.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Dalam melakukan analisis dan mendeskripsikan pengelolaan Ekowisata Mangrove Kampung Teluk Semanting, peneliti menggunakan teori *Good Tourism Governance* yang dikemukakan oleh (Sunaryo 2013) dengan mengacu pada prinsip pariwisata berkelanjutan dan berwawasan lingkungan yang terdiri dari sepuluh indikator keberhasilan, yaitu Partisipasi Masyarakat Terkait, Keterlibatan Segenap Pemangku Kepentingan, Kemitraan Kepemilikan Lokal, Pemanfaatan Sumber Daya Secara Berlanjut, Mengakomodasikan Aspirasi Masyarakat, Daya Dukung Lingkungan, Monitoring dan Evaluasi Program, Akuntabilitas Lingkungan, Pelatihan pada Masyarakat Terkait, serta Promosi dan Advokasi Nilai Budaya. Adapun berdasarkan proses observasi, wawancara, dan studi literatur dengan berlandaskan pada sepuluh indikator keberhasilan tata kelola kepariwisataan yang baik tersebut, peneliti mendapati hasil analisis sebagai berikut.

1. Partisipasi Masyarakat Terkait Menurut (Sunaryo 2013), indikator ini mampu dikatakan berhasil apabila masyarakat terlibat dalam menentukan visi misi atau tujuan pembangunan pariwisata yang ada, ikut serta mengidentifikasi sumber-sumber daya yang akan dilindungi, dikembangkan, dan dimanfaatkan, ikut dalam pelaksanaan rencana atau program yang telah disusun, dan melakukan pengawasan atau kontrol pembangunan kepariwisataan yang ada. Dalam Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Daerah Kabupaten Berau Tahun 2016-2031 sendiri tertulis bahwa pada dasarnya masyarakat memiliki peran penting agar pembangunan kepariwisataan yang dilakukan berdampak signifikan terhadap upaya mendorong peningkatan kesejahteraan masyarakat secara umum dan mengurangi berbagai dampak negatif yang mungkin ditimbulkan. Dimana keikutsertaan masyarakat dalam berkoordinasi dan kerjasama secara terpadu dengan dua aktor kunci lainnya memiliki peran penting dalam pencapaian tujuan dan sasaran pengembangan pariwisata daerah.

Setelah adanya kesadaran masyarakat Kampung Teluk Semanting sendiri terhadap pentingnya menjaga kawasan mangrove karena besarnya potensi dan manfaatnya bagi ketahanan pangan serta keberlangsungan hidup, mereka berdiskusi dengan para pihak untuk mengadakan program jasa lingkungan berupa ekowisata. Selain

keterlibatan masyarakat pada tujuan pembangunan tersebut, mereka juga membentuk lembaga lokal berupa Kelompok Sadar Wisata (POKDARWIS) dan Tim Pengelola

Mangrove (TPM) sebagai pengelola khusus dalam melaksanakan program yang telah dirancang dan melakukan pengawasan terhadap pembangunannya. Lembaga ini memiliki fokus utama yaitu keterlibatan masyarakat kampung secara luas. Dengan arahan dari mereka, pergerakan pembangunan ekowisata ini dimulai oleh masyarakat dengan swadaya mereka mengumpulkan kayu-kayu milik pribadi sebagai bahan pembangunan jalur *tracking* sepanjang 30 meter. Masyarakat juga turut memberikan laporan apabila menemukan adanya kerusakan atau penyalahgunaan sumber daya yang ada. Berdasarkan hal tersebut dapat dilihat masyarakat sudah terlibat cukup aktif dan baik, namun sayangnya yang menghambat optimalnya indikator ini pada tata kelola Ekowisata Mangrove Teluk Semanting yaitu tidak adanya keikutsertaan masyarakat dalam mengidentifikasi sumber daya lokal yang akan dimanfaatkan ataupun dilindungi dalam pelaksanaan program ekowisata. Adapun minimnya jumlah masyarakat yang ikutserta menghambat optimalnya pencapaian visi pelestarian kampung dan kinerja mereka.

2. Keterlibatan Segenap Pemangku Kepentingan

Sejalan dengan prinsip *Good Governance* dan pernyataan *United Nations Commission on Sustainable Development* bahwa ekowisata adalah *sustainable tourism* yang menjamin partisipasi aktif, efektif, dan setara dari seluruh stakeholder, (Sunaryo 2013) juga menyampaikan bahwasanya keaktifan dan produktivitas para pemangku kepentingan menentukan keberhasilan tata kelola yang baik dalam pembangunan kepariwisataan. Dimana pemangku kepentingan yang dimaksud adalah masyarakat seperti yang telah dijelaskan diatas, pemerintah, dan juga swasta. Pemerintah yang akan dibahas sendiri terdiri dari pusat, provinsi, dan kabupaten. Dimana pemerintah pusat telah memenuhi kewenangannya dengan baik melalui adanya regulasi mengenai penyelenggaraan kepariwisataan nasional berupa Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang

Kepariwisata, Peraturan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Kepala Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Nomor 9 Tahun 2021 tentang Pedoman Destinasi Pariwisata Berkelanjutan, dan 294 peraturan lainnya yang berkaitan dengan destinasi pariwisata. Selain terkait regulasi tersebut, pemerintah pusat juga menyusun Rencana

Induk Pembangunan Kepariwisata Nasional dan terlibat langsung dalam pengembangan dan pengelolaan Ekowisata Mangrove Teluk Semanting berupa kerjasama Pemerintah Indonesia dan Pemerintah Jerman yang menyalurkan bantuan dana, pembangunan fasilitas, dan juga melakukan pembinaan. Selain melalui program kerjasama, pemerintah pusat melalui Kementerian Kelautan dan Perikanan serta Kementerian Desa juga memberikan bantuan berupa pembangunan *tracking* dan gazebo.

Regulasi Pemerintah Pusat tersebut menjadi acuan untuk Pemerintah Provinsi menetapkan Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Provinsi dalam Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 14 Tahun 2008 yang tujuannya memberi arahan tentang kegiatan pengembangan kepariwisataan daerah. Sama halnya dengan provinsi, Pemerintah Kabupaten Berau juga membentuk Peraturan Daerah Kabupaten Berau Nomor 3 Tahun 2018 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Daerah Tahun 2016-2031. Selain terkait dengan RIPPARDA, Pemerintah Kabupaten Berau juga berkontribusi dalam Ekowisata Mangrove Teluk Semanting dengan menjembatani aspirasi dan komitmen kampung untuk mengubah kawasan mangrove menjadi destinasi ekowisata, hal ini dilakukan dengan program bersinergi dari pusat dan desa wisata yang menetapkan Teluk Semanting melalui SK No 427 Tahun 2018 ditetapkan menjadi Kampung Wisata dengan daya tarik wisata kawasan mangrove, habitat bekantan, dan penangkaran kepiting bakau dengan status lahan Kawasan Konservasi. Pemerintah Daerah melalui Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Berau juga membangun prasarana pendukung Ekowisata Mangrove yaitu fasilitas pusat kuliner sebanyak lima pintu untuk masyarakat pelaku usaha dan melakukan pewarnaan jalur *tracking*. Selain itu, swasta juga memiliki peran penting dalam rangka menopang keterbatasan kemampuan pemerintah dan masyarakat untuk membangun berbagai daya tarik wisata dan fasilitas pendukung pariwisata lainnya. Dimana sejauh ini, pihak swasta yang terlibat dalam pengelolaan Ekowisata Mangrove Teluk Semanting sendiri adalah lembaga non-profit yang tujuannya adalah mendukung suatu isu tanpa mencari keuntungan. Kontribusi yang ada dalam bentuk pendampingan dan pemberian pelatihan, pembangunan fasilitas seperti *tracking*, gazebo dan lainnya oleh lembaga Forum Lingkungan Mulawarman (FLIM), *Japan Fund for Poverty Reduction* (JFPR), FORCLIME FC, Yayasan Konservasi Alam Nusantara (YKAN), Yayasan Komunitas Belajar Indonesia (YAKOBI),

PT Sarana Multi Infrastruktur (PT SMI), Perisai Alam Borneo, *Indonesia Ecotourism Network* (INDECON), dan *PhotoVoices International* (PVI).

Berdasarkan pemaparan diatas dapat dilihat bahwa pemerintah dan swasta terlibat aktif dan produktif dalam pengelolaan Ekowisata Mangrove Teluk Semanting dalam bentuk bentuk pendanaan, pembangunan fasilitas, monitoring dan evaluasi program, dan pemberian pelatihan. Namun komunikasi yang ada baik itu secara internal maupun eksternal antar para pemangku kepentingan masih belum efektif.

3. Kemitraan Kepemilikan Lokal

Pembangunan kepariwisataan yang ada harus mampu memberikan kesempatan lapangan usaha yang luas bagi masyarakat setempat. Segala fasilitas penunjang Ekowisata yang ada harus dapat dikembangkan dan dipelihara oleh masyarakat setempat. Guna memudahkan dan mewujudkan kepemilikan lokal tersebut, sangat dibutuhkan pendidikan dan pelatihan bagi penduduk pengelola. Lebih lanjut, keterkaitan aktor lain dalam menunjang kepemilikan lokal tersebut juga merupakan penentu keberhasilannya (Sunaryo 2013). Modal yang digunakan dalam bentuk pengembangan baik itu terkait dengan Ekowisata Mangrove Teluk Semanting sendiri atau penunjang wisata lainnya seperti usaha masyarakat berasal dari pihak swasta atau *Non-Government Organization* (NGO) terutama dari luar negeri. Penggunaan dana kampung yang telah dikumpulkan hanya terpakai sebesar 5%, ini berarti modal dari NGO kurang lebih sebesar 95%.

Tentunya modal ini sangat berpengaruh pada membaiknya fasilitas yang ada dalam kawasan ekowisata, masyarakat pelaku usaha pun merasakan dampak dari hal ini berupa pemberian modal yang mereka gunakan untuk memelihara dan mengembangkan usaha mereka khususnya amplang dan kerupuk yang menjadi salah satu daya tarik budaya yang ada disana. Ini menunjukkan bahwa indikator ini telah berhasil secara optimal dari adanya model kemitraan sinergis dalam memelihara dan mengembangkan usaha fasilitas penunjang yang akhirnya menciptakan kepemilikan lokal dan memberikan kesempatan lapangan kerja yang berkualitas.

4. Pemanfaatan Sumber Daya Secara Berlanjut

(Sunaryo 2013) mengatakan bahwa sumber daya yang dibutuhkan dalam pembangunan kepariwisataan harus mampu digunakan secara berlanjut, dimana ini berarti pelaksanaan kegiatannya harus menghindari penggunaan secara berlebih pada sumber daya yang tidak dapat diperbaharui. Program kegiatan pembangunan yang ada juga harus bisa menjamin adanya pemeliharaan dan perbaikan pada sumber daya

alam maupun buatan yang digunakan berdasarkan kriteriakriteria dan standar-standar internasional yang sudah baku.

Sumber daya dalam Ekowisata Mangrove Teluk Semanting sendiri meliputi sumber daya alam (keunikan dan kekhasan ekosistem bakau, keragaman fauna dan kehidupan satwa liar, rekreasi perairan, dan lintas alam), sumber daya manusia, sumber daya budaya (kuliner), dan sumber daya pariwisata minat khusus (*tracking, birdwatching, glamour camping*, dan susur sungai).

Berdasarkan Standar Nasional Indonesia terkait pengelolaan pariwisata alam (SNI 8013:2014), pemanfaatan sumber daya yang ada di Ekowisata Mangrove Teluk Semanting telah mampu memenuhi prinsip (1) kelestarian fungsi ekosistem yang di lihat dari kriteria terpeliharanya lansekap alami dan terpeliharanya keberadaan spesies endemik/langka/dilindungi, (2) kelestarian obyek daya tarik wisata alam dengan kriteria terpeliharanya keberadaan dan kualitas ODTW utama, pengembangan sumber daya lain/lingkungan yang mendukung ODTW utama, serta pencegahan dan penanganan vandalism, (3) kelestarian sosial budaya dengan tiga kriterianya yaitu modal sosial, sosial budaya, dan keterbukaan akses, (4) kepuasan, keselamatan, dan kenyamanan pengunjung yang telah terpenuhi adalah pelayanan prima dan interpretasi ODTW, dan (5) manfaat ekonomi yang meliputi manfaat bagi pengusaha, manfaat bagi masyarakat, dan manfaat bagi pemerintah. Salah satu pemenuhan prinsip ini paling baik berupa ditetapkannya 5 zona yaitu zona pemanfaatan lain seluas 162,90 ha, zona penyangga 37,97 ha dimana didalamnya terdapat usaha tambak masyarakat saat ini, zona perlindungan 330,47 ha, wisata mangrove seluas 156,95 ha, dan wisata pantai seluas 60,57 ha guna menjaga tatanan lingkungan yang ada.

Sedangkan satu-satunya prinsip yang belum terpenuhi secara optimal adalah prinsip kepuasan, keselamatan, dan kenyamanan pengunjung pada kriteria keselamatan pengunjung dan sumber daya yaitu pada daya tarik menara pantau burung dan interaksi antara kawanan monyet dan wisatawan.

5. Mengakomodasikan Aspirasi Masyarakat

Dalam pelaksanaan kegiatan pariwisata agar terciptanya kondisi yang harmonis antara wisatawan, kawasan wisata, dan masyarakat lokal maka perlu adanya upaya mewadahi aspirasi masyarakat terkait dengan lingkungan pariwisata yang mereka harapkan. Upaya tersebutlah yang menurut (Sunaryo 2013) menjadi indikator keberhasilan dari prinsip ini sendiri.

Adapun yang menunjukkan indikator ini berjalan dengan sangat baik dan optimal dalam

Ekowisata Mangrove Teluk Semanting berupa adanya kegiatan *Focus Group Discussion* (FGD) dengan pendekatan *Participatory Rural Appraisal* (PRA) pada awal pembentukan ekowisata yaitu dengan melibatkan masyarakat dalam proses-proses pemikiran yang berlangsung selama kegiatan perencanaan dan pelaksanaan, serta pemantauan dan evaluasi program. Kegiatan ini dilakukan dengan memberikan kesempatan yang seimbang kepada seluruh masyarakat dan para pemangku kepentingan untuk mengeksperikan pandangan dan gagasannya serta menuliskan isu-isu yang ada di sekitar kampung, yang kemudian disepakati beberapa isu yang prioritas untuk ditangani lebih lanjut dengan pertimbangannya ke dalam perwujudan ekowisata yang ada.

Hingga kini upaya menampung, menyalurkan, dan menindaklanjuti aspirasi masyarakat terkait pelaksanaan wisata terus berlanjut dengan alur yaitu TPM adalah pihak yang berdiskusi langsung melalui pertemuan dengan masyarakat guna menampung ide-ide terkait pengembangan ekowisata seperti apa yang menurut masyarakat menjadi permasalahan dan apa lagi yang ingin masyarakat wujudkan, TPM kemudian menyalurkan aspirasi tersebut kepada pemerintah kampung untuk ditindak lanjuti bersama-sama dengan Pemerintah Daerah ataupun swasta.

6. Daya Dukung Lingkungan

Terkait indikator ini (Sunaryo 2013) memaparkan bahwasanya daya dukung lingkungan dalam pembangunan kepariwisataan yang harus dipertimbangkan dan dijadikan pertimbangan utama dalam mengembangkan berbagai fasilitas dan kegiatan kepariwisataan melalui daya dukung fisik, biotik, sosial-ekonomi, dan budaya. Pembangunan dan pengembangan harus sesuai dan serasi dengan batas-batas kapasitas lokal dan daya dukung lingkungan yang ada. Program dan kegiatan serta pengoperasiannya seharusnya dipantau dan dievaluasi secara regular sehingga dapat dilakukan penyesuaian/perbaikan yang dibutuhkan secara dini. Skala dan tipe fasilitas wisata harus diupayakan tidak melampaui batas ambang penggunaan yang dapat ditoleransi (*limits of acceptable use*).

Berdasarkan baik itu kriteria keaslian dari lingkungan fisik dan sosial ekonomi maupun citra pariwisata dan produk wisata didapati bahwa daya dukung lingkungan fisik yang meliputi kondisi fisik dan biotik telah mendukung penyelenggaraan ekowisata dilihat dari terjaganya sistem ekologis dan mengedepankannya konservasi kehidupan satwa liar dan vegetasi, tingkat kebersihan sesuai dengan permintaan wisatawan, serta tingkat daya tarik lanskap yang melihat dari kualitas dan karakteristik arsitektur, flora dan fauna, serta daya tarik alam lainnya. Secara daya dukung ekonomi

hal ini telah optimal dilihat dari adanya manfaat yang diberikan pada masyarakat lokal dan unsur biaya pada produk wisata yang ada sendiri telah sesuai dengan kualitas pengalaman wisata yang ditawarkan. Daya dukung sosial budaya telah cukup baik, terdapat manfaat yang dirasakan oleh masyarakat setempat, adapun kehadiran wisatawan yang beragam tidak membawa dampak buruk bagi sosial budaya masyarakat, dan keramah-tamahan masyarakat sangat mendukung penyelenggaraan Ekowisata Mangrove Kampung Teluk Semanting. Adapun prasarana sendiri telah dicukupi terkait dengan ketersediaan fasilitas transportasi dan utilitas seperti air bersih dan tenaga listrik.

Namun permasalahan yang menghambat optimalnya indikator ini adalah tidak tersedianya jaringan telekomunikasi yang memadai, pembuangan limbah dari perkebunan kelapa sawit disekitar kawasan ekowisata mengganggu kondisi biotik yang ada yaitu mangrove, permasalahan ini juga berkaitan dengan tidak adanya daya dukung prasarana yaitu ketersediaan utilitas pengolahan limbah. Permasalahan lain yaitu di bidang sosial budaya, tidak adanya kesenian, kerajinan, dan penampilan budaya.

7. Monitoring dan Evaluasi Program

Dalam pengembangan dan pengelolaan wisata yang ada tentunya telah ditetapkan halhal apa saja yang ingin dicapai. Untuk mengetahui kesesuaian rencana program kerja yang dibuat berdasarkan kebutuhan dan karakter suatu wisata maka dibutuhkanlah monitoring dan evaluasi. Lebih lanjut, kegiatan ini untuk dapat mengetahui proses pencapaian rencana dan juga dapat mengetahui target apa saja yang telah dicapai maupun yang belum dapat direalisasikan. YKAN sendiri sebagai salah satu lembaga swasta telah melakukan kegiatan monitoring dan evaluasi ini secara optimal dengan mengukur kegiatan tersebut menggunakan suatu penilaian yang dilakukan dengan cara mengidentifikasi karakteristik kawasan wisata, dimana instrument penilaian tersebut memuat atraksi, amenities, aksesibilitas, sumber daya manusia, masyarakat, industry, serta promosi dan pemasaran.

Masyarakat sendiri sebagai penduduk lokal terlibat dalam hal ini secara lebih umum yaitu pengawasan di area Ekowisata Mangrove Teluk Semanting, memastikan tidak ada lagi perusakan pohon-pohon mangrove dan pemburuan liar pada satwa-satwa yang ada. Masyarakat dan YKAN pun berdiskusi lebih lanjut terkait dengan upaya yang perlu dilakukan untuk mengatasi kekurangan atau permasalahan yang masih ditemukan ketika evaluasi tersebut. Sedangkan monitoring yang dilakukan pemerintah khususnya Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Berau sendiri berupa pembinaan. Diawali dengan

melakukan pengawasan di kawasan wisata, melihat apa yang masih menjadi kekurangan, kemudian dilanjutkan dengan pembinaan terkait bagaimana mengembangkan potensi dan mengatasi kekurangan yang ada. Terkait pengawasan berbasis lingkungan sendiri dilakukan oleh dinas lain seperti Dinas Perikanan.

8. Akuntabilitas Lingkungan

Dalam bukunya (Sunaryo 2013) mengungkapkan bahwa pembangunan kepariwisataan tentu perlu untuk memperhatikan kebermanfaatannya bagi lingkungan terlebih lagi bagi masyarakat baik itu secara ekonomi dan sosial-budaya. Itu merupakan salah satu bentuk akuntabilitas atau pertanggungjawaban atas tindakan pariwisata yang dilakukan.

Akuntabilitas sendiri pada dasarnya merupakan sebuah konsep etika yang dekat dengan administrasi publik, dimana hal ini adalah kewajiban para aktor untuk mengelola sumber daya, melaporkan, dan mengungkapkan segala bentuk kegiatan yang berkaitan dengan penggunaan sumber daya publik sehingga dapat dipertanggungjawabkan (*responsibility*), dipertanyakan (*answerability*), dan dipersalahkan (*blameworthiness*). Ini merupakan instrument untuk mengukur apakah prinsip-prinsip hukum, transparansi, keberpihakan, dan kesamaan hak telah diterapkan guna menjamin nilai-nilai efisiensi, efektifitas, realibilitas, dan predektibilitas dari administrasi publik dalam pengelolaan ekowisata yang ada.

Dalam Ekowisata Mangrove Teluk Semanting sendiri prinsip tersebut telah mampu terpenuhi, secara hukum dapat dilihat dari penetapan regulasi maupun pedoman dari skala nasional, regional, maupun lokal. Secara transparansi dilihat dari proses kerjasama pembangunan, dimana segala bentuk rancangan pembangunan telah disediakan oleh pihak kampung dan Tim Pengelola Mangrove berdasarkan urgensi yang ada. Sehingga setiap lembaga diberikan kebebasan secara terbuka untuk memilih bantuan yang ingin disalurkan. Secara keberpihakan dapat dilihat dari manfaat hadirnya Ekowisata Mangrove ini bagi kesejahteraan masyarakat Kampung Teluk Semanting. Kesamaan hak sendiri telah optimal dalam pengelolaan yang ada melihat dari berbagai aktor yang terlibat baik itu pemerintah, swasta, dan masyarakat dapat terlibat secara aktif dan sinergis dalam perencanaan, pelaksanaan, maupun pengawasan.

Keberhasilan indikator ini juga dapat dilihat dari komitmen para aktor baik berupa aktivitas maupun anggaran. Namun sayangnya mekanisme pertanggungjawabannya sendiri belum sesuai dengan prinsip transparansi dan

akuntabilitas yang sebenarnya dikarenakan tidak adanya peran akuntansi berupa laporan pertanggungjawaban pelaksanaan yang ada. Sehingga sejauh ini akuntabilitas lingkungan yang ada hanya berupa manfaat yang dirasakan masyarakat secara nyata sesuai indikator GTG.

9. Pelatihan pada Masyarakat Terkait Demi menunjang pertumbuhan ekowisata tentunya dibutuhkanlah pelaksanaan program pendidikan dan pelatihan guna meningkatkan pengetahuan dan keterampilan masyarakat baik itu tentang pariwisata berkelanjutan, bisnis pariwisata, manajemen pariwisata, dan topik relevan lainnya.

Di kawasan Teluk Semanting sendiri telah ada beberapa pelatihan terkait dengan pariwisata, namun sayangnya baik itu dari pihak penyelenggara ataupun penerima tidak memiliki pencatatan terkait pelatihan yang telah terlaksana sehingga hanya bergantung pada ingatan saja, sehingga menurut penulis hal ini menghambat pengamatan perkembangan secara pasti.

Adapun pelatihan tersebut telah memenuhi standar karena membawakan topik-topik yang relevan dengan pariwisata berkelanjutan yaitu berupa pelatihan *guide*, *hospitality*, *home stay*, sejarah dan kebudayaan, *printing*, *public speaking*, penyusunan paket wisata, serta tata kelola bisnis dan pemasaran destinasi wisata.

10. Promosi dan Advokasi Nilai Budaya

Dalam pelaksanaan kepariwisataan berkelanjutan tentunya diperlukan promosi yang dilakukan guna memperkuat karakter tempat wisata dan identitas masyarakat. Promosi sendiri adalah kegiatan pengenalan suatu destinasi wisata yang tidak hanya bertujuan untuk menarik wisatawan, tetapi juga menumbuhkan kesadaran kepada wisatawan tentang nilai penting destinasi tersebut (Sunaryo 2013).

Upaya promosi terkait Ekowisata Mangrove Teluk Semanting ini sendiri telah dilakukan oleh beberapa pihak terkait, antara lain yang dilakukan oleh Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif dalam websitenya yaitu Jejaring Desa Wisata (JADESTA), Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Berau juga telah melakukan promosi wisata ini yang dapat dilihat dalam beberapa sosial media milik disbudpar yaitu website www.disbudpar.beraukab.go.id, instagram @disbudpar_beraukab dan youtube Pariwisata Berau. Selain pemerintah, masyarakat selaku aktor pemangku kepentingan juga melakukan upaya promosi, lebih tepatnya yang dilakukan oleh Tim Pengelola Mangrove dalam laman Instagram mereka @bakauta_teluksemanting. Berdasarkan pemaparan terkait prinsip diatas dapat dikatakan bahwa upaya promosi telah cukup baik dilakukan akan tetapi hal ini belum optimal akibat tidak

lengkapya informasi terkait destinasi ekowisata yang ada dan tidak ada pembaharuan terkait dengan informasi atau kegiatan wisata.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian diatas, menunjukkan bahwa keaktifan dan sinergitas pemerintah, swasta, dan masyarakat pada Ekowisata Mangrove Teluk Semanting telah cukup baik. Hal ini dapat dilihat melalui 5 dari 10 indikatornya telah berhasil optimal yaitu kemitraan kepemilikan lokal yang telah mampu menciptakan kepemilikan lokal dan telah mampu dikelola dengan baik, mengakomodasi aspirasi masyarakat terlihat dari setiap aspirasi masyarakat selalu ditampung untuk dipertimbangkan dan dilaksanakan, salah satunya melalui kegiatan FGD. Indikator lain yang telah berhasil yaitu monitoring dan evaluasi program terlihat dari ketiga aktor kunci telah melakukannya meski dengan bentuk yang berbeda-beda, pelatihan pada masyarakat terkait yang telah banyak dilakukan dan telah berdampak sangat baik pada peningkatan kemampuan dan keterampilan masyarakat, serta akuntabilitas lingkungan, dimana bila berdasarkan yang dikemukakan oleh (Sunaryo 2013) maka tata kelola ini telah optimal dalam Ekowisata Mangrove Teluk Semanting. Namun tidak memenuhi prinsip akuntabilitas secara umum yaitu adanya mekanisme pertanggungjawaban berupa laporan tertulis. 5 indikator lainnya sendiri telah terlihat dalam pengelolaan ekowisata yang ada, hanya saja belum optimal karena tidak semua nilai keberhasilan didalamnya dapat terlaksana. Seperti partisipasi masyarakat terkait dikarenakan tidak adanya upaya identifikasi sumber daya dan rendahnya kuantitas masyarakat, keterlibatan segenap pemangku kepentingan yang dilihat dari kurang efektifnya komunikasi, daya dukung lingkungan terlihat dari kurangnya beberapa fasilitas yang mendukung keberlanjutan pembangunan dan pengembangan ekowisata, promosi dan advokasi nilai budaya dikarenakan tidak adanya informasi yang lengkap dan terbaru. antar bidang sehingga menghasilkan sinergi. Sebagai contoh, dapat dilakukan rapat atau diskusi antar bidang Destinasi Pariwisata dan bidang Pemasaran dan Kerjasama terkait lembaga-lembaga lain yang masuk untuk ikut serta bekerjasama dalam pembangunan pariwisata yang ada. Sehingga, seluruh komponen dari lembaga mengetahui bentuk kerjasama yang ada dan dapat saling mempertanggungjawabkan tugas dan fungsi masing-masing.

Indikator terakhir yaitu pemanfaatan sumber daya secara berlanjut, dimana baik itu karena faktor internal ataupun eksternal menyebabkan beberapa sumber daya belum tergolong aman.

Adapun berdasarkan kesimpulan tersebut, peneliti memberikan saran yang dapat dijadikan sebagai bahan masukan atau pertimbangan bagi pemerintah, swasta, dan masyarakat yang terlibat dalam Ekowisata Mangrove Kampung Teluk Semanting sebagai berikut.

1. Peningkatan bentuk komunikasi antara pemerintah, swasta, dan masyarakat. Komunikasi sendiri merupakan kunci utama untuk dapat melaksanakan fungsi masing-masing lembaga, mengefisienkan dan mengefektifkan program yang akan dilaksanakan, dan tentunya untuk mencapai tujuan bersama. Komunikasi ini berupa komunikasi eksternal yang dilakukan oleh lembaga swasta yang ingin terlibat dalam kawasan pariwisata maka perlu melakukan komunikasi dengan bidangbidang terkait di Dinas Kebudayaan dan Pariwisata seperti bidang Destinasi Pariwisata dan bidang Pemasaran dan Kerjasama meskipun perjanjian kerjasama telah dilakukan dengan Pemerintah Daerah tetapi perlu adanya pemberitahuan kepada dinas dan bidang-bidang terkait didalamnya yang lebih spesifik mengurus tentang pembangunan dan kerjasama pariwisata. Komunikasi lain antar pemerintah, baik itu pemerintah pusat dengan daerah maupun antar bidang di dalam Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Berau sendiri. Mengingat antar bidang tentunya saling berkaitan, maka perlu adanya bentuk komunikasi organisasi yang menghubungkan dan membangkitkan kinerja
2. Membuat, melengkapi, dan memperbaharui pencatatan baik itu terkait sumber daya pariwisata yang dimiliki berupa dokumen daftar aset baik itu sumber daya alam, budaya, minat khusus, dan modal guna mengetahui apa saja yang perlu dimanfaatkan, dilindungi, dan diperbaiki. Pencatatan lainnya berupa daftar pelatihan yang dilakukan atau pun diterima guna mengukur pencapaian masing-masing lembaga dan memantau

manfaatnya bagi peningkatan kemampuan masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

- Sunaryo, B. (2013). *Kebijakan Pembangunan Destinasi Pariwisata Konsep dan Aplikasinya di Indonesia.pdf* (p. xiv + 240). Muhammad, A. (2019). *Tata Kelola Pariwisata Pantai Batumianak Kecamatan Topoyo Kabupaten Mamuju Tengah*. Universitas Muhammadiyah Makassar.

PERATURAN

- Kemenpar. (2016). *DRAFT 24 agt 2016_net1. Peraturan Menteri Pariwisata*, 1–64.
- Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif. (2020). Rencana Strategis KEMENPAREKRAF/BAPAREKRAF 2020-2024. *Kemenparekraf*, 1–136.
- PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI, Pub. L. No. NOMOR 33 TAHUN 2009 (2009).
[https://jdih.mkri.id/mg58ufsc89hrsg/Permen.No.33-2009\(1\).pdf](https://jdih.mkri.id/mg58ufsc89hrsg/Permen.No.33-2009(1).pdf)

JURNAL

- Hidayat, I. K., & Rahayu, S. (2017). *GOOD TOURISM GOVERNANCE DALAM PENGELOLAAN KAMPUNG WISATA DI KAWASAN KOTAGEDE KOTA YOGYAKARTA*. 545–561.
- Scott, N., & Marzano, G. (2015). Governance of tourism in OECD countries. *Tourism Recreation Research*, 40(2), 181–193.
<https://doi.org/10.1080/02508281.2015.1041746>

SKRIPSI

- Muhammad, A. (2019). *Tata Kelola Pariwisata Pantai Batumianak Kecamatan Topoyo Kabupaten Mamuju Tengah*. Universitas Muhammadiyah Makassar.
- Hidayati, N. (2018). PENGEMBANGAN KAWASAN WISATA TLATAR DI KABUPATEN BOYOLALI DALAM PERSPEKTIF GOOD TOURISM GOVERNANCE. *Skripsi Administrasi Publik*.

DOKUMEN LAIN

- Mulawarman, Forum Lingkungan. 2017. “Laporan Survey Biodiversity Kawasan Hutan Mangrove Kampung Teluk Semanting.” Laporan Survey. Pariwisata, Dinas Kebudayaan dan. 2016. *Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataaan Daerah Kabupaten Berau Tahun 2016-2031*. Berau: Pemerintah Kabupaten Berau.
- Semanting, Kampung Teluk. 2021. *Profil Kampung Teluk Semanting Tahun 2021*. Berau: Pejuang Sigap Sejahtera.
- Semanting, Tim Pengelola Mangrove Teluk. 2017. *Dokumen Site Plan Ekowisata Mangrove Kampung Teluk Semanting Tahun 2017*. Laporan Akhir, Jakarta: Forum Lingkungan Mulawarman dan Tropical Forest Conservation Act.

INTERNET

- Headline Kaltim. 2022. *Headline Kaltim*. 11 03. Diakses 04 2022.
<https://headlinekaltim.co/pemerintah-diminta-perhatikan-pembangunan-jalan-aspal-diteluk-semanting/>.
- Jalil, Abdul. 2020. *Menjaga Hutan Mangrove, Menyelamatkan Kampung*. 12 Maret. Diakses 2022.
<https://www.liputan6.com/regional/read/4199149/menjagahun-an-mangrovenyelamatkan-kampung>.
- Jaringan Desa Wisata. 2022. *Desa Wisata Ekowisata Mangrove Teluk Semanting*. Diakses 12 12, 2022.
https://jadesta.kemenparekraf.go.id/desa/ekowisata_mangrove_teluk_semanting